

Eksistensi Feminisme Mesir dan Transformasi Gerakan Perempuan di Indonesia

Muhammad Fahmi Ilmy

Universitas Padjadjaran

fahmiilmy@gmail.com

Abstract: *Islamic feminism becomes an interesting issue when there are injustice and inequality in the functions and structures of life. The Egyptian state is part of the Middle East which inspired the reformist movement pioneered by Zainab Al Ghazali (1917-2005) by prioritizing preaching, social and political approaches. Given the organization view, there is support for the direction of the Indonesian women's movement to contribute to the country. The purpose of this research is to examine Islamic feminism in Egypt and to find out the direction of the Indonesian women's movement. This research uses qualitative research with a book-based literature study approach, official institution reports, and journals. The results showed that Islamic feminism in Egypt was oriented towards the socio-political field through preaching activities on the occurrence of injustice and differences in political views. Meanwhile, the direction of the Indonesian movement at the same time uses organized women through Aisyiyah and Muslimat with educational, economic, social, health and religious approaches that aim to seize independence and fill it up to this day. The implication is that the Islamic feminism movement, both in Egypt and Indonesia, have the same premise as an effort for the existence of women to contribute to life.*

Keywords: *Feminism, Woman, Movement, Islam*

Abstrak: Feminisme Islam menjadi isu menarik ketika terjadi ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam fungsi dan struktur kehidupan. Negara Mesir merupakan bagian Timur Tengah menginspirasi gerakan reformis dipelopori Zainab Al Ghazali (1917-2005) dengan mengedepankan pendekatan dakwah, sosial dan politik. Hal tersebut memberi dukungan arah gerakan perempuan Indonesia untuk berkontribusi bagi negara. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji feminisme Islam di Mesir dan mengetahui arah gerakan perempuan Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka berdasar buku, laporan lembaga resmi, dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa feminisme Islam di Mesir terjadi dengan berorientasi pada bidang sosial politik melalui kegiatan dakwah atas terjadinya ketidakadilan dan perbedaaan pandangan politik. Sedangkan arah gerakan Indonesia di saat yang bersamaan menggunakan perempuan yang terorganisir melalui Aisyiyah dan Muslimat dengan pendekatan pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan dan agama yang bertujuan merebut kemerdekaan dan mengisinya hingga saat ini. Implikasinya gerakan feminisme Islam keduanya sebagai upaya eksistensi perempuan dalam berkontribusi dalam kehidupan.

Kata Kunci: Feminisme, Perempuan, Gerakan, Islam

PENDAHULUAN

Dalam pandangan teologis khususnya Islam, dimana semua manusia sama dihadapan Allah kecuali yang membedakan tingkat ketaqwaan-nya sehingga Al-Qur'an sebagai pedoman mengajarkan bahwa antar manusia harus memandangnya sama dalam bentuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* dan hubungan sosial

lainnya. Persamaan tersebut menurut Natardi dkk (2020) perempuan atau laki-laki memiliki eksistensi yang berbeda dalam budaya, bangsa, waktu, tempat, atau peradaban sehingga aspek gender menimbulkan dikotomi peran, posisi, dan karakteristik.

Pentingnya memahami konsep keadilan, persamaan hak serta konstruksi sosial antar manusia penting atas dasar persamaan hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan sehingga antar manusia memberikan toleransi nol atas berbagai bentuk penindasan manusia yang satu dengan lainnya, baik atas nama kekuatan (Indira, 2018). Namun demikian kekokohan dan keharmonisan interelasi laki-laki dan perempuan dapat meminimalisir kesalahfahaman, miskomunikasi dan eksploitasi diantara mereka.

Memaknai perempuan menjadi partner penting dalam mengisi kehidupan bagi setiap laki-laki sehingga peran keduanya menjadi kekuatan yang besar bagi alam semesta ini. Situasi gender ini mengakibatkan perjuangan gender menghadapi banyak perlawanan, tidak hanya dari laki-laki yang terancam oleh "hegemoni" kekuasaan mereka (Ahdar, 2015). Selain itu Nurbaeti (2018) berpendapat gender merupakan pembedaan yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang berfungsi sebagai hasil dari tatanan sosial yang ditransformasikan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Kedudukan perempuan sebelum datangnya Islam menjadi objek eksploitatif dan tidak dihargai sebagai manusia sehingga ada sebagian yang berpandangan makhluk pembawa sial dan memalukan serta tidak mempunyai hak untuk diposisikan di tempat terhormat pada masyarakat (Setiawan, 2019). Dalam memahami feminisme Rokhmansah (2016) mengatakan bukan hanya meminta hak saja tetapi juga merupakan doktrin yang menggabungkan persamaan hak bagi perempuan dengan gerakan terorganisir untuk mencapai hak asasi perempuan serta merupakan sebuah ideologi transformasi sosial. Keduanya menjelaskan merubah keadaan tidak secara nyata dilaksanakan dengan penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural antara laki-laki dan perempuan.

Pandangan di atas ketika adanya eksistensi perempuan di Timur Tengah khususnya di Mesir, bagaimana feminisme Islam muncul atas pemikiran dan gagasan Zainab Al-Ghazali (1917-2005) melalui gerakan Islam feminis yang dipengaruhi Gamal

Abdul Naser dengan mengangkat hak-hak wanita yang dibenarkan oleh Islam, sehingga mampu menggerakkan reformasi bidang sosial, politik, pendidikan dan dakwah (Indira, 2018).

Dimana Mesir menjadi salah satu negara Timur Tengah dengan tingkat kesetaraan perempuan yang rendah di posisi 136 dari total 145 negara, ranking ke 135 dalam *gender gap* di bidang partisipasi dan kesempatan ekonomi, serta posisi 115 di bidang kesetaraan pendidikan dan dalam hal pemberdayaan politik perempuan Mesir berada di posisi 136 (weforum.org, 2015). Hal demikian memberikan akses negatif yaitu tidak berhasilnya upaya perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender di negara Timur Tengah terutama di Mesir disebabkan dua faktor penghambat yaitu keadaan ekonomi yang didominasi oleh sektor yang berbasis kekuatan fisik dan kebudayaan (Jamilah, 2017).

Hadirnya tokoh Zainab Al Ghazali gerakan feminisme di Mesir, pada tahun 1801-1908 diawali sebagai emansipasi wanita yang digerakkan oleh at-Thahthawi dan Qasim Amin, dimana dalam penelitian Erasiah (2014) menunjukkan kedua tokoh tersebut memiliki misi gerakan yang berbeda dimana at-Thahthawi terfokus pada gerakan pentingnya pendidikan bagi wanita sedangkan Qasim Amin terkonsentrasi pada gerakan perkawinan, hijab dan pemisahan wanita dalam pergaulan. Relevansi pembaharuan feminisme Islam di Mesir yang digagas oleh Zainab Al Ghazali menjadi arti penting bagi arah gerakan perempuan di Indonesia, sebagaimana diketahui Indonesia merupakan umat Islam terbanyak di dunia sehingga dayapikat gerakan feminisme Islam mengalami transformasi melalui afiliasi atau organisasi keagamaan atau partai politik yang berkembang masa penjajahan, pasca kemerdekaan dan pasca reformasi melalui gerakan dakwah yang bernaung dalam Muhammadiyah (1912) yang menggagas berdirinya Aisyiyah (1917) sebagai gerakan perempuan Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (1926) yang menggagas berdirinya Muslimat NU (1940).

Kondisi tersebut memberikan dukungan bagi pergerakan di beberapa negara berkembang, dimana perempuan dan politik masih eksis dalam struktur patriarki (Ihromi, 1995). Hak politik dan kepemimpinan perempuan hingga saat ini menjadi persoalan pelik meskipun demikian perkembangan pemikiran tentang kepemimpinan menjadi hak setiap insan sehingga banyak argumentasi masyarakat yang menentang karena menurut sebagian adanya pertentangan dengan ajaran Islam.

Dengan penjelasan di atas, perlu dikaji bagaimana gerakan feminisme yang terjadi di Timur Tengah khususnya di Mesir yang dimotori oleh Zainab Al Ghazali dengan gerakan teologis, sosiologis dan politisnya dapat mengarahkan pada transformasi gerakan perempuan Indonesia baik yang terjadi sebelum dan setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi feminisme Islam di Mesir dan relevansinya dengan arah gerakan perempuan di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dengan pendekatan studi pustaka (*literature research*) untuk memahami permasalahan yang diajukan adalah deskriptif analitik dengan studi kualitatif, sedangkan data dikumpulkan menggunakan literatur berupa buku, artikel, laporan lembaga baik tertulis maupun sumber digital. Dari studi literatur kemudian diperiksa kebermaknaannya yang relevan dengan aktualisasi peran Zainab Al Ghazali di Mesir yang ditransformasi dengan arah gerakan perempuan di Indonesia disertai keterlibatannya aspek teologi, politik, dan sosiologi.

PEMBAHASAN

Letak geografis Mesir berada di sepanjang Sungai Nil dengan sebagian besar tanah tidak berpenghuni di Gurun Sahara, sedangkan mayoritas penduduk Mesir adalah Muslim dan selebihnya adalah Kristen Koptik, kemudian mayoritas penduduk muslim tidak terlepas dari perjuangan para dai dan gerakan politik yang gencar memperjuangkan ideologi Islam (Maryam, 2017). Dengan mobilisasi mayoritas Muslim memudahkan untuk penyebaran tauhid melalui gerakan politik, pendidikan dan dakwah, dimana aktivis Muslim bergerak di bawah naungan Ikhwanul Muslimin sehingga mendukung perjuangan Mesir untuk bertahan hidup sebagai negara Islam terkait dengan gerakan aktivis yang bertekad menyebarkan Islam (Mulki, 2012).

Kekuasaan politik di Mesir dikuasai oleh dua faksi besar, yaitu angkatan bersenjata yang mengontrol hubungan negara dan partai Islam yang dikendalikan oleh program Ikhwanul Muslimin yang sering bertentangan sehingga demokrasi diperkenalkan di Mesir dalam bentuk partai tunggal (*monoparty*) dengan militer yang kuat (Indira, 2018). Adanya peran Arab- menunjukkan kehadiran Islam dalam deskripsi ekspresi politik dan sosial menunjukkan bahwa Islamisme merupakan jalan integral

bagi gerakan masyarakat sipil global di Arab untuk mencapai tujuan politiknya (Yasmine, 2018).

Dengan munculnya gagasan Zainab telah menampakkan adanya kesadaran baru bahwa isu feminisme Islami harus mampu membentuk pemahaman agar isu kesetaraan yang lebih tinggi sehingga tidak terasing dan terisolasi dalam menghadapi politik dunia baru (Mulky, 2014). Dengan demikian terjadinya gap kondisi sosial politik di Mesir yang melibatkan peran perempuan ketika Zainab Al Ghazali melakukan reformasi sehingga pandangan eksistensi gerakan perempuan tidak bisa dihindari sebagai bukti kepeduliannya kepada negara dan agama.

Gerakan dan pemikiran Zainab Al-Gazali, dengan perjuangan politik, mencoba untuk mendirikan negara Islam berdasarkan hukum Islam di Mesir. Ide feminis ini untuk menyuarkan hak-hak perempuan, dengan norma yang membatasi perempuan dalam menekan kebebasan perempuan seperti mengenakan jilbab yang dibatasi sehingga perempuan Islam, menegakkan hal yang benar, dan menolak yang munkar, pendidik anggota jemaah agar menjadi generasi warga negara yang cerdas dan taat beragama (Fitriyah, 2017).

Esensi keadilan dan kesetaraan gender tidak terlepas dari konteks di mana masyarakat memahami peran dan posisi laki-laki dan perempuan dalam realitas sosial, namun masyarakat belum memahami fungsi non-sosial dan struktur budaya tentang peran tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian Zainab membangun konstruksi reformasi pada gerakan dan kepentingan umat Islam di Mesir saat itu dengan cara membenarkan wanita agar aktif dalam kegiatan sosial politik, dan menyatakan pendapat, menyadarkan muslimah akan hak dan kewajiban dalam masyarakat, syariat sangat menghormati wanita, dan mengangkat derajat wanita.

Munculnya gerakan perempuan baru, yang didirikan pada awal tahun 1970-an, sangat mencurigai politik arus utama dan negara, yang pada dasarnya bersifat patriarkal, sehingga negara merupakan instrumen dominasi di tangan kelas penguasa dan menekankan pentingnya peran perempuan. kepentingan perempuan sebagai buruh, kepentingan keluarga, dan kepentingan kapitalisme (Gaus & Kukathas, 2012). Sedangkan pendapat Rasyidin & Fidhia (2016), dimana melihat negara secara negatif dengan adanya pandangan feminisme sosialis terutama mengintegrasikan penindasan terhadap perempuan ke dalam perspektif marxis. Kedua pandangan tersebut,

menjadikan feminisme marxis dengan mendominasi perempuan sebagai akses sosial dan feminisme kapitalis dimana perempuan dijadikan buruh yang murah.

Hal ini menjadi latar belakang perbedaan identitas yang dilihat secara positif, bukan sebagai penghalang bagi mobilitas politik. Namun, teori feminis tak terbatas pada bagaimana memikirkan kembali “isu perempuan” atau peran perempuan di dalam politik praktis, walaupun tugasnya sebagai perempuan tersebut juga penting (Gaus & Kukathas, 2012). Untuk itu Rahman (2010) berpendapat teori feminisme dibangun dari teori kehidupan sosial dan pengalaman manusia dari sudut pandang perempuan, dimana teori feminisme berfokus pada situasi dan pengalaman perempuan dalam masyarakat, pembelajaran perempuan sebagai inti dan membela perempuan dalam upaya menciptakan dunia yang lebih baik (Rahman, 2010). Dengan demikian feminisme menjadi gagasan dan gerakan yang dilandasi kepedulian perempuan terhadap nasib dan haknya sehingga mampu melawan ketidakadilan yang menyertai setiap perempuan dengan tidak menghilangkan kodratnya.

Perspektif feminis dalam ilmu politik cenderung menitikberatkan pada masalah perbedaan gender dalam menjelaskan partisipasi politik. Para feminis menurut Lovenduski (2008) berpendapat bahwa yang bersifat politik mencakup kehidupan pribadi dan rumah tangga berdasarkan hubungan kekuasaan yang tidak setara dimana perempuan memiliki kekuasaan dan kekuasaan atas perempuan, dimana teori politiknya telah mengubah cara berpikir orang tentang isu-isu utama dalam teori politik. Dimana Gaus & Kukathas (2012) menjelaskan bahwa teori feminis telah menerapkan gerakan ganda. *Pertama*, memperluas gagasan politisi ke tempat-tempat kekuasaan di luar arena politik formal dan institusi publik, dan *kedua*, mengatur peran negara dan hubungannya terhadap peran negara sehingga cenderung meninggalkan generalisasi negara dan meningkatkan generalisasi negara dan meningkatkan fokus pada analisis praktis serta konstruksi gender melalui politik.

Feminisme lahir dalam masyarakat patriarki dimana terjadi ketimpangan bagi perempuan dari akses yang terbatas, hak untuk memilih, pendidikan dan penindasan lainnya sehingga sebagian besar aktivis feminis generasi pertama dengan jelas bertanya-tanya mengapa perempuan adalah manusia kelas rendah (Vera, 2017). Gerakan yang dilakukan Zainab Al-Ghazali adalah sosok wanita pionir di Mesir yang memiliki banyak pengikut dan dakwah yang dia sebarkan membuat para wanita

muda dan ibu-ibu bersimpati dengan gaya bicaranya yang menyebabkan para pendengarnya meningkatkan semangat hidup tidak hanya mengubah hidup mereka menjadi lebih baik serta kemampuannya meluruskan pola pikir anak muda dan anak perempuan dengan melakukan diskusi tentang isu-isu yang bersifat sentimental, sosial dan humanistik yang dilihat dari sudut pandang Islam.

Gerakan feminisme dalam sosial politik tersebut di atas menjadi proses sosialisasi sebagai proses yang terdiri dari dua bagian, dimana satu pihak melakukan sosialisasi politik dan yang lainnya adalah pihak bagian yang disosialisasikan. Dalam pelaksanaannya, proses sosialisasi politik dilakukan oleh anggota masyarakat atau anggota yang mempunyai kewenangan terhadap individu yang disosialisasikan, seperti pemerintah, partai politik, sekolah, perguruan tinggi dan berbagai perkumpulan lainnya (Elly, 2013).

Tumbuhnya gerakan perempuan di Indonesia telah terlibat dan menjadi bagian penting dari perjuangan kemerdekaan, reformasi sampai saat ini. Selain gerakan perempuan sendiri membawa budaya politik baru yang dilandasi oleh etika kepedulian pada pusat budaya politik atas kepemimpinan laki-laki sehingga partisipasi perempuan dalam politik telah menjadi bagian penting dari pemerintahan dan keadilan, peran Nyai Ahmad Dahlan yang aktif dalam gerakan sosial keagamaan. Komitmennya untuk memilih jalur pendidikan (Burhanudin, 2002). Kemudian, menurut Wirianto (2018) pendidikan merupakan proses transformasi budaya yang membutuhkan waktu seumur hidup untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia.

Salah satu bukti paling jelasnya adalah munculnya perempuan pertama Indonesia, Megawati Soekarno Putri kemudian ada peningkatan jumlah anggota dewan perempuan di setiap lembaga legislatif sehingga membuka pintu bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik sehingga seiring dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam arena politik, semakin banyak perempuan yang bergabung dengan politik (Setiawan, 2020). Hal tersebut menunjukkan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan akan dapat terwujud sebagaimana mestinya apabila terjadi suatu proses demokratisasi yang memberikan ruang gerak, wewenang terhadap perempuan untuk mengaktualisasikan potensi dirinya. Dengan demikian hal ini

penuh kesadaran dan pemberdayaan perempuan akan dapat diwujudkan sebagaimana diharapkan (Shalihin & Firdaus, 2019).

Kesetaraan gender merupakan cara lain dalam upaya mendorong terwujudnya laki-laki dan perempuan yang menjadi satu pondasi dalam pembentukan dan pembentukan gagasan, struktur, dan sistem organisasi atau kedudukan, serta menjadi bagian dari budaya bernapas di dalamnya, dimana hak perempuan, kesempatan yang sama untuk belajar sehingga menurut Karim (2014) mulai dilihat sebagai tindakan perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya di Indonesia.

Gerakan perempuan Indonesia pada awalnya bertujuan untuk mempromosikan pendidikan perempuan, integrasi perempuan ke dalam politik, dan sebagai upaya untuk melawan penjajahan Belanda dan Jepang dan pandangan dunia mendapatkan kesempatan dalam dunia pendidikan, dengan demikian perempuan Indonesia tidak sepenuhnya merangkul ide-ide luar terutama yang terkait dengan pembebasan (Ida dkk, 2014).

Bagaimana arah gerakan perempuan Indonesia terbentuk pasca reformasi tentunya tidak terlepas dari kiprah di Indonesia, terdapat dua organisasi dengan pengikut yang banyak dengan organisasinya adalah Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU). Dalam hal bahasa, sering diibaratkan para pengamat Islam Indonesia menurut Isnaeni (2017), Muhammadiyah disebut kaum "modernis", sedangkan NU disebut "budaya tradisional". Julukan ini tidak mengikat sebab perbedaan keduanya tidak selalu hitam dan putih. Dalam banyak kasus, perbedaan hanya terlihat pada bacaan Aisyiyah, sebagai kelahiran perempuan Muhammadiyah bertepatan dengan lahirnya gerakan Islam terbesar di Indonesia.

Lebih dari 100 tahun mengabdikan di Indonesia, 'Aisyiyah kini memiliki 34 pimpinan wilayah, 370 pimpinan daerah, 2.332 pimpinan cabang dan 6.924 pimpinan ranting. Nama 'Aisyiyah berasal dari salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Kiprah dan prestasi 'Aisyiyah terlihat dari prestasinya dalam mengangkat status perempuan sehingga berhak membangun kesadaran perempuan atas perannya. (Nur'aini, 2013). Sedangkan Muslimat yang didirikan pada 29 Maret 1946 dengan gerakan awal mempersiapkan diri untuk memerangi tantangan yang dihadapi perempuan dengan gerakan keagamaan perempuan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai agen perubahan politik. (Roviana, 2014). Keduanya memberikan kontribusi yang besar bagi

pergerakan perempuan di Indonesia dalam memajukan pembangunan nasional dengan mengedepankan pendidikan, sosial, ekonomi dan agama.

Dari perspektif feminis, aspek politik tampaknya hanya terbatas pada aspek kekuasaan dan legislasi. Alhasil, gagasan penguatan peran politik perempuan selalu ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada perempuan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam bidang politik formal seluas-luasnya, misalnya di lembaga pemerintahan atau kekuasaan, badan legislatif, partai politik dan lain-lain. Padahal, hal tersebut berkaitan dengan logika feminis yang didasarkan pada teori mekanisme kekuasaan mayoritas yang ada dalam logika demokrasi, yang mengasumsikan bahwa jika perempuan berpartisipasi dalam politik maka permasalahan perempuan akan terselesaikan (Ahdar, 2018).

Pentingnya semangat Zainab di Mesir memberi arah gerakan perempuan Indonesia dengan pemberdayaan perempuan melalui taraf pendidikan perempuan, meningkatkan kualitas sumber daya perempuan dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan, meningkatkan kesehatan perempuan dan keluarganya sehingga perempuan dalam pembangunan keluarga dapat meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam masyarakat sehingga meningkatkan harkat dan martabat perempuan (Rahim, 2016). Gerakan perempuan Indonesia telah memasukkan isu rumusan perempuan dalam agenda politiknya, dimana arah gerakan dan pemikiran perempuan di Indonesia terus berkembang tercermin dari munculnya berbagai organisasi yang dibentuk untuk melindungi hak-hak perempuan dan suara mereka di berbagai isu, termasuk keragaman gender, disabilitas, perempuan adat dan sebagainya (Aditya & Delia, 2019).

Eksistensi feminisme di Indonesia menjadi emansipasi yang lebih luas, harapannya agar kemajuan perempuan di Indonesia ke depan dapat membawa perubahan antara lain: perempuan dalam politik, dimana adanya perwakilan politik perempuan, yang menjadi sumber pemikiran yang menarik dan fokus pada kajian perempuan sehingga adanya tigapuluh persen dengan kepemimpinan perempuan dalam politik, peran perempuan dalam pembangunan, pengentasan kemiskinan, kebutuhan kesehatan reproduksi perempuan, pemberdayaan dan pendidikan. Dimana hal tersebut sesuai pendapat Maula (2019) bahwa pada pemilu 2019 jumlah

perempuan terpilih sebanyak lebih dari duapuluh dua persen dari partisipasi yang terlibat.

KESIMPULAN

Pandangan feminisme kapitalisme dan marxisme terhadap gerakan reformasi yang dilakukan Zainab Al Ghazali sebagai feminisme Islam tidak terlepas dari keinginan kaum perempuan melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negaranya, dengan diawali perbaikan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Afiliasi yang dilakukannya memberikan ruang gerak lebih luas dengan bergabung dengan Ikhwanul Muslimin walaupun eksistensinya tidak terlepas melepaskan belenggu kaum perempuan dari ketidakadilan dan kesewenang-wenangan negara sehingga dampak gerakannya memberikan inspirasi ke seluruh dunia tidak hanya di Timur Tengah bahkan hingga ke Indonesia.

Adanya relevansi perkembangan gerakan reformis Zainab Al Ghazali memberikan inspirasi kepada pelajar Indonesia di Timur Tengah akan pentingnya eksistensi persamaan hak. Adanya perubahan arah gerakan perempuan di Indonesia pada awal kemerdekaan tidak terlepas dengan peran Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama dimana keduanya membentuk organisasi perempuan, dimana Muhammadiyah dengan 'Aisyiyah dan Nahdhatul Ulama dengan Muslimatnya. Kontribusi keduanya hingga saat ini berperan besar bagi kaum perempuan terutama dalam pendidikan, sosial, ekonomi dan keagamaan, dengan empat ruh tersebut menjadi pilar penting dalam pembangunan nasional serta kematangan sosial dan intelektual telah mampu menghadirkan tokoh politik perempuan yang mumpuni untuk menjaga gerakan perempuan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Perdana & Delia Wildianti (2019). Gerakan Perempuan Politik Setelah 20 Tahun Reformasi di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 24(1), 43-52.
- Ahdar, Djameluddin. (2015). Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 8(1), 1-26.
- Burhanuddin, J. (2002). *Ulama Perempuan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Elly, M. Setiadi. (2013) *Pengantar Sosiologi Politik*. Cet.II. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Fitriyah. (2017). *Kesetaraan Gender Menurut Zainab Al-Ghazali (Studi Analisis Tafsir Nazharat Fi Kitabillah)*. Tesis: Program Studi Ilmu Agama Islam Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an. Jakarta: PTIQ.

- Gaus, Gerald F. & Kukathas, Chandran. (2012). *Handbook Teori Politik*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Ida HA, Siti K & Endah RC. (2018). Sejarah Feminisme Indonesia Dalam Lintasan. *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, 1(2), 140-143.
- Ihromi. (1995). *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Indira, Fatra Deni P. (2018). Gender di Dunia Islam. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 5(5), 40-53.
- Isnaeniyah, Erni. (2017). Partisipasi Politik Perempuan Islam Indonesia Dalam Tradisi "NU". *Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya*, 2(1), 154-168.
- Jamilah, Maryam. (2017). Ketidaksetaraan Gender Perempuan Mesir di Bidang Politik Pasca Arab Spring 2011. *Buana Gender*, 2(2), 149-163
- Karim, Abdul. (2014). Kerangka Studi Feminisme (Model Penelitian Kualitatif Tentang Perempuan Dalam Koridor Sosial Keagamaan). *Fikrah*, 2(1), 57-73.
- Lovenduski, Joni. (2008) *Politik Berparas Perempuan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Maula, Bani Syarif. (2019). Indonesian Muslim Women In Contemporary Political Contestations: Challenges to Gender Mainstreaming Policy In The 2019 Elections. *Al-Tahrir*, 19(2), 195-217
- Mulki, Muhamad Asrory. (2012). Gerakan Agama dan Politik di Mesir: Refleksi atas Ikhwan Al Muslimin dan Revolusi Pemuda Tahrir Square di Kairo. *Ilmu Ushuluddin*, 1(3), 219-282
- Natardi, Ali Hamzah & Doli Witro. (2020). Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Reposisi Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Quran. *Jurnal Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 13(1), 64-76
- Nura'ini, Dyah Siti. (2013). Corak Pemikiran dan Gerakan Aktivistis Perempuan (Melacak Pandangan Keagamaan Aisyiyah Periode 1917-1945). *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 14(2), 125 - 138.
- Nurbaeti. (2018). Menelusuri Konsep Gender Dalam Al-Qur'an. *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 11(2), 252-277
- Nurus, Shalihin & Firdaus. (2019). Transformasi Gender: Strategi Pembebasan Perempuan dari Jerat Pembangunan dan Kapitalisme. *SAWWA: Jurnal Studi Gender*, 14(1), 109-140.
- Rahim, Abdul. (2016). Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Gender. *Jurnal Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 9(2), 268-295.
- Rahman, Mohammad Taufiq. (2010). *Social Justice in Western and Islamic Thought: A Comparative Study of John Rawl's and Sayyid Qutb's Theories of Social Justice*. Dissertasi. Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
- Rasyidin & Fidhia Aruni. (2013). *Gender Dan Politik: Keterwakilan Wanita Dalam Politik*. Sulawesi: Unimal Press
- Rokhmansyah, Alfian. (2016). Pengantar Gender Dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme. Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca.

- Roviana, Sri. (2014). Gerakan Perempuan Nahdlatul Ulama dalam Transformasi Pendidikan Politik. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 403-424.
- Setiawan, Eko. (2019). Studi Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kesetaraan Gender dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Panggung Politik. *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*, 14(2), 221-244)
- Vera Pasaribu. (2017) *Perempuan dan Pembangunan Nasional*. Medan: Universitas HKBP Nommensen
- Wirianto, Dicky. (2020). Potensi Perempuan Aceh dalam Pendidikan. *Jurnal Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 13(1), 26-37
- World Economic Forum. (2015). *The Global Gender Gap Report (2015)*. World Economic Forum
- Yasmine, Shafira Elnanda. (2012). Arab Spring: Islam Dalam Gerakan Sosial dan Demokrasi Timur Tengah. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 28(2), 106-113.